

# ANALISIS HUBUNGAN PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SUBSIDI DENGAN TINGKAT KEMISKINAN

Annisa Dewi Pusparani <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

Jl. Kapt. Suparman No. 39 Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah - 56116

\*Korespondensi Penulis: [annisadewi270@gmail.com](mailto:annisadewi270@gmail.com)

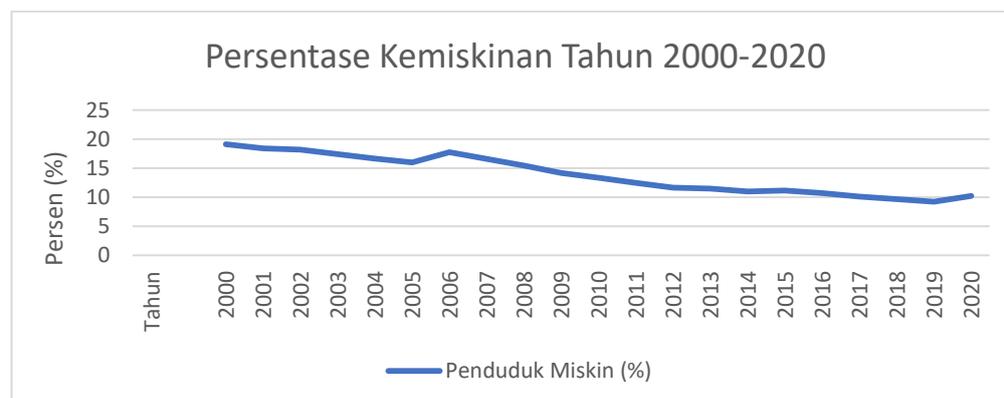
**Abstract:** Poverty is still a complex problem in Indonesia and even for the whole world. Poverty is defined as the condition of a person with a low standard of living and unable to meet their basic needs. This study aimed to determine the impact of government spending on education, government spending on health, and subsidy spending on the poverty line in Indonesia from 2000 to 2020. This study uses an Error Correction Model (ECM) analysis model with time-series data. From 2000 to 2020. The results obtained from the analysis in the survey show that government spending on education and subsidies hurts poverty in Indonesia, but not significantly. Meanwhile, government spending on health has a positive impact and substantially affects the poverty rate in Indonesia.

**Keywords:** Government Spending; Poverty

## PENDAHULUAN

Kemiskinan saat ini masih menjadi topik perbincangan yang serius di semua negara terutama untuk negara berkembang. Permasalahan kemiskinan saat ini masih menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia karena kemiskinan bukan hanya merupakan masalah pendapatan yang rendah namun juga terkait dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kesehatan masyarakat. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai keadaan seseorang dengan taraf hidup yang rendah yang ditandai oleh keadaan yang serba kekurangan akan kebutuhan pokok. Kadji (2004) berpendapat bahwa kemiskinan mencakup ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam aspek utama dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan, serta kebutuhan marginal dalam bentuk jaringan sosial dan sumber daya keuangan.

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan trend yang menyusut dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Pada tahun 2000 hingga 2005 tingkat kemiskinan cenderung menurun, namun pada tahun 2006 naik sebesar 1,78% yang dikarenakan adanya kenaikan harga BBM pada tahun tersebut. Pada tahun 2006 hingga 2019 tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2020 tingkat kemiskinan kembali mengalami kenaikan yang dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19. Berikut ini merupakan grafik perkembangan tingkat kemiskinan dari tahun 2000 – 2020.

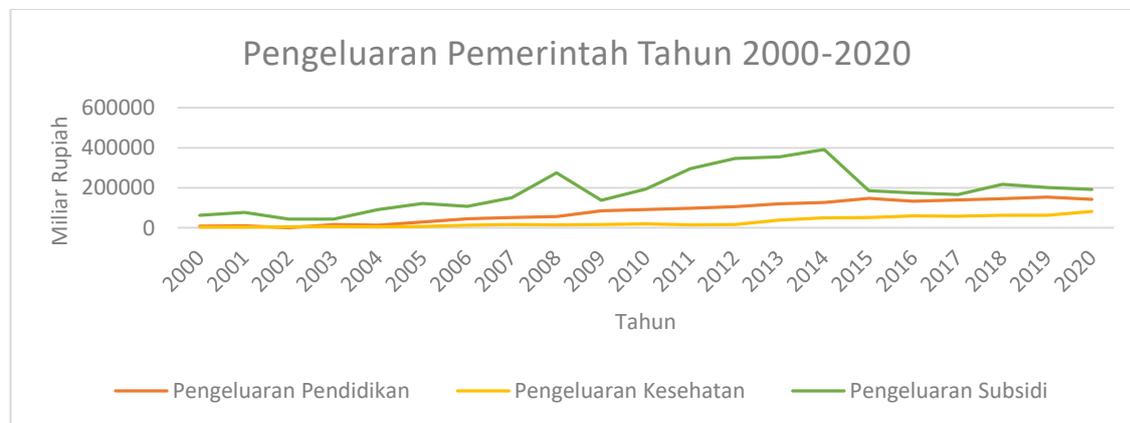


**Gambar 1.** Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2000-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah (2021)

Upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan agenda tahunan yang menjadi *masterplan* jangka panjang pembangunan nasional. Penanggulangan kemiskinan harus diusahakan semaksimal mungkin sebagaimana telah dimaklumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah dalam berbagai bentuk kebijakan salah satunya melalui pengeluaran pemerintah. Kebijakan pengeluaran pemerintah ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang meliputi kebutuhan pendidikan, kesehatan, sumber daya alam, dan perumahan.

Peningkatan pendidikan menandakan kesejahteraan yang membaik, apabila tingkat pendidikan meningkat maka penduduk miskin juga akan berkurang dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Widodo et al., 2012). Selain itu, kesehatan dan subsidi pemerintah merupakan sektor yang paling diperhatikan di berbagai negara berkembang dalam rangka pengentasan kemiskinan. Studi yang dilakukan oleh Jha (2001), Ramadhan & Mariyanti (2013), Wibowo (2014), Kolawole et al. (2015), Mufliha (2018), Kristinawati et al. (2018) mengidentifikasi bahwa jenis pengeluaran pemerintah yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengeluaran untuk pendidikan, pengeluaran untuk kesehatan dan pengeluaran subsidi.



**Gambar 2.** Perkembangan Pengeluaran Pemerintah tahun 2000-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah (2021)

Berdasarkan gambar di atas, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki trend yang condong mengalami kenaikan. Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk melaksanakan mandat yang tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk memberikan prioritas pada anggaran pendidikan setidaknya 20 persen dari APBN. Selain itu, hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui peningkatan pendidikan. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan juga mengalami peningkatan hampir di setiap tahunnya. Sedangkan pengeluaran subsidi mengalami fluktuasi dari tahun 2000-2020. Jumlah pengeluaran pemerintah yang cukup besar untuk pendidikan, kesehatan dan subsidi menunjukkan bahwa pemerintah berkontribusi dalam upaya memerangi kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk menganalisis dampak dari pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan serta pengeluaran subsidi terhadap tingkat kemiskinan serta melihat apakah peningkatan pada pengeluaran pemerintah tersebut sudah signifikan dalam upaya mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia pada tahun 2000 – 2020.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan seseorang dengan taraf hidup yang rendah di mana penghidupan masyarakat ditandai oleh serba kekurangan akan kebutuhan esensial. Bappenas (2021) menafsirkan kemiskinan sebagai suatu kualifikasi bahwa seseorang atau sekelompok orang, termasuk pria dan/atau wanita, belum mampu memenuhi hak dasarnya untuk

menjamin dan membangun kehidupan yang tetap. Supriatna (1997) yang dikutip oleh Kadji (2004) memanasifestasikan kemiskinan sebagai keadaan seseorang yang sangat terbatas dan terjadi bukan atas kemauan pribadi. Secara luas, kemiskinan ditafsirkan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya dengan cukup berdasarkan dengan persepsinya (Kurnianingsih, 2012). Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan adalah suatu situasi rendahnya taraf hidup seseorang dan tidak mampu mencukupi kebutuhannya yang timbul bukan atas kemauan orang tersebut.

Chambers dikutip oleh Suryawati (2005) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan satu kesatuan kerangka dengan lima ukuran, yaitu: (1) kelayakan; (2) ketidakberdayaan; (3) keadaan genting; (4) depedensi; dan (5) isolasi baik dalam aspek kemasyarakatan maupun aspek geografis. Kuncoro (1997) menyebutkan aspek-aspek yang memicu timbulnya kemiskinan antara lain : 1) kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan sebagai akibat dari kepemilikan sumber daya yang tidak merata; 2) kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kapabilitas sumber daya manusia; 3) kemiskinan muncul disebabkan oleh akses modal yang tidak merata. Sedangkan Kurnianingsih (2012) menyebutkan bahwa terdapat dua penyebab kemiskinan yaitu : 1) kemiskinan yang terjadi karena faktor alamiah dimana terdapat keterbatasan sumber daya alam, rendahnya pemanfaatan kemajuan teknologi serta musibah yang sewaktu-waktu dapat terjadi; 2) kemiskinan artifisial yang terjadi karena adanya lembaga masyarakat yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat mendominasi struktur ekonomi dan layanan lain yang tersedia.

### **Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah diartikan sebagai bagian integral dari kebijakan pemerintah pada sektor fiskal yang ditujukan guna mendorong peningkatan investasi, memperluas kesempatan kerja, mempertahankan stabilitas ekonomi serta mencapai pemerataan pendapatan (Amalia et al., 2015). Sukirno (2006) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah adalah suatu aktivitas pemerintah untuk menyelenggarakan dan mengatur jalannya kegiatan perekonomian dengan cara menentukan jumlah pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan oleh pemerintah yang termaktub dalam APBN dan APBD yang merupakan salah satu bagian penting dalam kebijakan fiskal. Teori makro ekonomi mengutarakan bahwa pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga kategori esensial yaitu sebagai berikut : 1) pengeluaran yang difungsikan untuk belanja jasa dan barang; 2) pengeluaran untuk pembayaran upah pegawai; dan 3) pembayaran transfer pemerintah (Boediono, 1999).

Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh penting dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Mehmood & Sadiq (2010) menjumpai hasil bahwa antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat kemiskinan memiliki hubungan pada jangka pendek begitu pula pada jangka panjang. Hal tersebut diperkuat melalui studi yang dihasilkan oleh Amalia et al. (2015) yang mengkonfirmasi bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak secara langsung terhadap kemiskinan. Jha (2001), Ramadhan & Mariyanti (2013), Wibowo (2014), Kolawole et al. (2015), Mufliha (2018), Kristinawati et al. (2018) dalam hasil penelitiannya mengidentifikasi bahwa jenis pengeluaran pemerintah yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengeluaran untuk pendidikan, pengeluaran untuk kesehatan dan pengeluaran subsidi. Jha (2001) menunjukkan dalam hasil studinya bahwa pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan dapat membantu untuk mengurangi kemiskinan. Hal tersebut ekuivalen dengan yang disampaikan oleh Kolawole et al. (2015) dalam penelitiannya menjumpai bahwa kenaikan jumlah dalam pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan dapat membantu upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Sedangkan Mufliha (2018) dan Kristinawati et al. (2018) mendapati bahwa pengeluaran subsidi akan mengurangi tingkat kemiskinan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data deret waktu dengan periode antara tahun 2000 hingga 2020 melalui data yang diperoleh dari situs badan resmi pemerintahan. Proses analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan metode

kuantitatif. Data deret waktu (*time series*) adalah data yang sekuensial yang diatur berdasarkan waktu dan beberapa variabel tertentu (Kuncoro, 2009). Penelitian ini menggunakan beberapa data yang terdiri dari : (1) data tingkat kemiskinan dalam bentuk persen (%) yang didapatkan dari situs resmi Badan Pusat Statistik; (2) data pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dalam miliar rupiah yang didapatkan dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia; (3) data pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dalam miliar rupiah yang didapatkan dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia; (4) data pengeluaran subsidi dalam miliar rupiah yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik. Variabel dependen yang digunakan dalam studi analisis ini adalah tingkat kemiskinan yang dapat diamati dari persentase populasi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan variabel independen dalam studi ini adalah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran subsidi yang diukur dengan nilai realisasi dalam APBN tahun 2000-2020.

Model *Error Correction Model* (ECM) atau model koreksi kesalahan merupakan model analisis yang digunakan dalam studi ini yang dilakukan dengan bantuan alat analisis yaitu Eviews 10. Model ECM pada umumnya merupakan suatu proses penyesuaian yang digunakan untuk menyesuaikan kondisi jangka pendek dengan keseimbangan pada jangka panjang antar variabel. Model ECM menuntut bahwa data harus tidak stasioner pada tingkat level, tetapi stasioner pada derajat integrasi dan memiliki kointegrasi antar variabel. Langkah-langkah analisis dengan model ECM melewati tiga tahap analisis data yaitu (1) uji stasioneritas data; (2) uji kointegrasi; (3) estimasi model ECM. Model dasar matematis yang diangkat dalam studi ini adalah sebagai berikut :

$$Pov = f (P_t, K_t, S_t)$$

Sehingga berdasarkan model matematis tersebut, maka model persamaan jangka panjang dapat ditulis sebagai berikut :

$$Pov_t = \beta_0 + \beta_1 P_t + \beta_2 K_t + \beta_3 S_t + e_t$$

Dimana :

- Pov = Kemiskinan
- P = Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan
- K = Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan
- S = Pengeluaran subsidi
- e = *error term*
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien

Sedangkan persamaan model jangka pendek dapat dituliskan sebagai berikut :

$$D(Pov_t) = \beta_0 + \beta_1 D(P_t) + \beta_2 D(K_t) + \beta_3 D(S_t) + \beta_4 ECT(-1)$$

Dimana :

- $D(Pov_t)$  = Kemiskinan pada tingkat diferensi pertama
- $D(P_t)$  = Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan pada tingkat diferensi pertama
- $D(K_t)$  = Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan pada tingkat diferensi pertama
- $D(S_t)$  = Pengeluaran subsidi pada tingkat diferensi pertama
- ECT = *Error Correction Term* (residual pada lag 1)

Penelitian ini menggunakan metode observasi yang didukung melalui tinjauan kepustakaan. Tinjauannya untuk menemukan fenomena yang sedang terjadi pada masyarakat yang kemudian berusaha untuk dicarikan solusi melalui kajian pustaka. Tinjauan kepustakaan untuk membandingkan temuan terkini dengan penelitian dengan terdahulu. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber yang dibutuhkan sebagai dasar dalam mengeksplorasi bagaimana peran keberadaan *e-commerce* berbasis Islam dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Stasioneritas Data (*Unit-Root Test*)

Untuk membuktikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian tidak mengandung akar unit yang maka digunakan uji stasioneritas data yang dilakukan dengan menggunakan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) dengan taraf signifikansi 5%. Hipotesis stasioner diterima apabila nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi.

**Tabel 1.** Uji Stasioneritas Data Tingkat Level

Variabel	Tingkat Level	
	Probabilitas	Keterangan
Pov	0.6381	Tidak Stasioner
Pendidikan	0.5279	Tidak Stasioner
Kesehatan	0.9933	Tidak Stasioner
Subsidi	0.3400	Tidak Stasioner

**Sumber :** Eviews 10, data diolah (2021)

Berikut merupakan hasil uji stasioneritas pada tiap-tiap variabel dalam persamaan pada tingkat level. Berdasarkan hasil uji stasioneritas melalui uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) diketahui bahwa seluruh variabel dalam persamaan tidak stasioner pada tingkat level yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas setiap variabel yang lebih besar dari taraf signifikansi 5%.

**Tabel 2.** Uji Stasioneritas Data Tingkat First Difference (1<sup>st</sup>)

Variabel	Tingkat 1 <sup>st</sup> Difference	
	Probabilitas	Keterangan
Pov	0.0082	Stasioner
Pendidikan	0.0025	Stasioner
Kesehatan	0.0418	Stasioner
Subsidi	0.0015	Stasioner

**Sumber :** Eviews 10, data diolah (2021)

Model ECM menuntut bahwa seluruh variabel harus stasioner pada derajat yang sama, sehingga selanjutnya dilakukan uji stasioneritas pada derajat integrasi. Hasil pengujian stasioneritas pada derajat integrasi menunjukkan bahwa tiap-tiap variabel mempunyai nilai probabilitas yang lebih rendah dari taraf signifikansi 5% sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel stasioner pada derajat pertama.

### 2. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat relevansi antar variabel dalam jangka panjang. Uji *Johansen Cointegration Test* yang berdasarkan pada nilai *trace*-statistic dipilih sebagai alat untuk pengujian kointegrasi pada studi ini. Hipotesis relevansi jangka panjang diterima apabila hasil pengujian menunjukkan nilai *trace*-statistic yang lebih besar dari nilai *Critical Value*. Hasil pengujian kointegrasi dengan uji *Johansen Cointegration Test* disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.** Uji Kointegrasi

Hypothesized No. of CE(s)	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob
None *	62.97977	47.8561	0.001

At most 1 *	31.7137	29.7970	0.0297
At most 2	13.63152	15.4947	0.0936
At most 3 *	5.452341	3.84146	0.0195

Sumber : Eviews 10, data diolah (2021)

Seperti dapat dilihat dari hasil pengujian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kointegrasi dalam persamaan yang ditunjukkan dari nilai *trace-statistic* sebesar  $62.97 > 47.85$  dan nilai probabilitas  $0.001 < 0.05$ . Selain itu, kointegrasi juga dapat dilihat melalui residual data yang stasioner pada tingkat level. Berdasarkan hasil uji stasioneritas diketahui bahwa nilai residual data stasioner pada tingkat level yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 10%, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat kointegrasi pada variabel dalam persamaan.

**Tabel 4.** Uji Stasioneritas Residual Data

Variabel	Probabilitas	Keterangan
Resid01	0.0786	Terkointegrasi

Sumber : Eviews 10, data diolah (2021)

### 3. Uji Hipotesis ECM

#### 3.1 Estimasi Jangka Pendek

Pengujian dengan ECM bertujuan untuk melihat bagaimana efek jangka pendek maupun jangka panjang dari variabel independen terhadap tingkat kemiskinan. Hasil estimasi model ECM pada jangka pendek ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.** Hasil Estimasi Model ECM Jangka Pendek

Dependent Variabel : D(LOG(POV))

Variabel	Coef	t-statistic	Prob
C	-0.031551	-2.148079	0.0528
Pendidikan	-0.069722	-1.307534	0.2155
Kesehatan	0.075674	1.81651	0.0943
Subsidi	-0.032583	-0.989715	0.3419
ECT(-1)	-0.032822	-1.876837	0.0851
R-Squared	0.449585		

Sumber : Eviews 10, data diolah (2021)

Berdasarkan hasil estimasi diatas dapat ditulis persamaan model adalah berikut :

$$D(\text{Pov}) = - 0.031551 - 0.069722 D(\text{P}) + 0.075674 D(\text{K}) - 0.032583 D(\text{S}) - 0.032822 \text{ECT}(-1)$$

Hasil estimasi pada jangka pendek tersebut menunjukkan bahwa residual memiliki nilai koefisien negatif dan signifikan, sehingga dapat dikatakan model yang digunakan valid. Nilai R-squared = 0.449585 menunjukkan bahwa 44,95% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya 55,05% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Koefisien pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan (P) adalah negatif namun tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa jika terdapat kenaikan anggaran untuk pendidikan sebesar 1 miliar rupiah maka akan menyebabkan penurunan pada tingkat kemiskinan sebesar 0.0697 persen. Koefisien pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan (K) hasil yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Keadaan ini menggambarkan bahwa jika terdapat peningkatan pada anggaran untuk kesehatan sebesar 1 miliar rupiah maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0.0756 persen. Koefisien pengeluaran subsidi (S) terhadap kemiskinan adalah negatif namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa jika terdapat kenaikan pada anggaran untuk subsidi sebesar 1 miliar rupiah maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.0325 persen.

### 3.2 Estimasi Jangka Pendek

**Tabel 6.** Hasil Estimasi Model ECM Jangka Panjang  
Dependent Variabel : POV

Variabel	Coefficient	t-statistic	Prob
C	-0.036622	-2.321322	0.0372
Pendidikan	-0.040046	-0.719647	0.4845
Kesehatan	0.086459	1.917636	0.0774
Subsidi	-0.025805	-0.721671	0.4833

Sumber : Eviews 10, data diolah (2021)

Berdasarkan hasil estimasi diatas maka dapat dibentuk model persamaan untuk jangka panjang yaitu sebagai berikut :

$$Pov = - 0.036622 - 0.040046(P) + 0.086459(K) - 0.025805(S)$$

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Penelitian ini memperoleh hasil yang mengkonfirmasi bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan namun tidak signifikan dalam mempengaruhi pergerakan tersebut. Secara empiris, hasil temuan tersebut sejalan dengan studi yang dilaksanakan oleh Jha (2001) yang menemui hasil bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mampu mengatasi kemiskinan. Hal yang selaras juga dinyatakan oleh Wibowo (2014) dalam penelitiannya yang mengkonfirmasi bahwa antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif.

Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dalam penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan namun dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dikarenakan belum meratanya pengalokasian anggaran pendidikan untuk daerah-daerah terpencil sehingga banyak masyarakat kalangan menengah ke bawah yang tidak dapat mengenyam pendidikan guna meningkatkan taraf hidup. Selain itu, peningkatan anggaran untuk pendidikan tidak disertai dengan peningkatan lapangan usaha sehingga menimbulkan kemiskinan baru.

### 2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Kemiskinan

Hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada tingkat kemiskinan. Hal ini mengartikan bahwa kenaikan anggaran pada bidang kesehatan akan menaikkan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini ekuivalen dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2010) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap pergerakan tingkat kemiskinan. Hasil tersebut juga didukung oleh hasil riset yang dilakukan oleh Isman (2020) yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan akan meningkatkan kemiskinan.

Peningkatan kemiskinan karena pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan juga dipengaruhi adanya pengalokasian dana yang kurang tepat sasaran. Arianto & Nantabah (2020) mengemukakan bahwa salah satu permasalahan dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia adalah efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang kurang optimal berupa kurangnya alokasi anggaran dan anggaran yang tidak sesuai dengan prioritas. Sementara itu, Isman (2020) juga menyimpulkan bahwa penyebab pengaruh positif pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kemiskinan disebabkan karena tidak seimbang nya peningkatan anggaran dengan lapangan kerja.

### 3. Pengaruh Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk subsidi berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan namun tidak secara signifikan. Hasil ini sejalan dengan studi

yang dijalankan oleh Kristinawati et al. (2018) yang menyatakan bahwa peningkatan pada pengeluaran subsidi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil tersebut diperkokoh oleh penelitian yang dilakukan Mufliha (2018) yang mengidentifikasi bahwa subsidi turut berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.

Dalam penelitian ini, pengeluaran subsidi memberikan kontribusi terhadap tingkat kemiskinan namun belum secara signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan tersebut. Salah satu penyebab kurang optimalnya pengeluaran subsidi dalam mengatasi kemiskinan karena pendistribusian yang kurang tepat sasaran. Subsidi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil merata. Yustika (2008) menyebutkan bahwa selama ini subsidi lebih banyak diterima oleh masyarakat kelas menengah.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini bertujuan untuk melihat arah hubungan variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pengeluaran subsidi dalam pengentasan kemiskinan baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran subsidi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan namun tidak secara signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis adapun saran yang dapat diberikan adalah mengenai peninjauan kembali terhadap pengalokasian dan pendistribusian dana untuk pendidikan, kesehatan dan subsidi agar lebih optimal dan tepat sasaran. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga masyarakat terdidik dan terlatih dapat memasuki pasar tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Madris, & Razak, A. R. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Analisis*, 4(2), 183–189.
- Arianto, G., & Nantabah, Z. K. (2020). Analisis Pembiayaan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Di Indonesia Tahun 2013 & 2014. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(1), 61–69. <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i1.940>
- Bappenas. (2021). Diagnosis Kemiskinan. *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)*, 13–73. <https://www.bappenas.go.id/files/4713/5229/9515/bab2snpkbaru11juni>
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Isman, F. M. (2020). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingginya Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015-2019 (Studi Kasus Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jha, R. (2001). An Emprical Analysis of the Impact of Public Expenditures on Education and Health on Poverty in Indian States. *Australia South Asia Research Centre (ASARC)*, 30. <https://econpapers.repec.org/paper/pasasarcc/2001-05.htm>
- Kadji, Y. (2004). Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya. *UNG Repository*, 55. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Kolawole, B. O., Omobitan, O. A., & Yaqub, J. O. (2015). Poverty, Inequality and Rising Growth in Nigeria: Further Empirical Evidence. *International Journal of Economics and Finance*, 7(2), 51–62. <https://doi.org/10.5539/ijef.v7n2p51>
- Kristinawati, A., Sarfiah, S. N., & Destiningsih, R. (2018). Terbuka Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1998-2018 Analysis of the Influence of Education , Open Unemployment Rate and Expenditure of Subsidy on Poverty. *Directory Journal of Economic (DINAMIC)*, 2(4), 985–1004.
- Kuncoro, Mudrajad. (1997). *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

- Kurnianingsih, T. (2012). Dimensi Kemiskinan. *Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan APBN DPR RI*, 47–56.  
[http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn\\_Dimensi\\_Kemiskinan20130130135844.pdf](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Dimensi_Kemiskinan20130130135844.pdf)
- Mehmood, R., & Sadiq, S. (2010). The Relationship between Government Expenditure and Poverty: A Cointegration Analysis. *Romanian Journal of Fiscal Policy (RJFP)*, 1(1), 29–37.  
<https://www.econstor.eu/handle/10419/59799>
- Mufliha, N. M. (2018). Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Subsidi terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2013 – 2017. In *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Ramadhan, H., & Mariyanti, T. (2013). Pengaruh Pajak, Subsidi Dan Zis Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 22(2), 123.  
<https://doi.org/10.25105/me.v22i2.3170>
- Sukirno, Sadono. (2006). *Makro Ekonomi Teori Pengantar: Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (JMPK)*, 08(03), 585–597.  
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmpk/article/view/2927/2646>
- Waluyo, A. (2010). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia dan Pengurangan Kemiskinan*. Universitas Indonesia.
- Wibowo, M. E. (2014). Analisis Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan ( Studi Kasus Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah ). In *Universitas Diponegoro* (Issue 1).
- Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.25-42>
- Yustika, A. E. (2008). Refleksi Subsidi dalam Perekonomian Indonesia. *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)*, 9(3), 1–5.